

KONSTRUKSI SOSIAL MAHASISWA FIS UNESA TENTANG KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Pola Yogi Hardani

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
Polayogi168@gmail.com

FX. Sri Sadewo

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
fsadewo@yahoo.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini berawal dari ketertarikan terhadap maraknya pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Realitas sosial tentang hal tersebut dapat membentuk konstruksi sosial pada masyarakat, khususnya mahasiswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dalam hal ini penelitian mendeskripsikan konstruksi sosial mahasiswa tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis kampus cenderung terkonstruksi oleh pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Mahasiswa percaya dengan pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK. Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka korupsi dianggap belum ideal. Selain merujuk pada pemberitaan di media massa, mahasiswa aktivis kampus dan non-kampus juga memiliki idealisme dan pengkajian tentang korupsi. Berbeda dengan konstruksi sosial mahasiswa nonaktivis yang hanya merujuk pada pemberitaan di media massa.

Kata Kunci: konstruksi sosial, pemberitaan, pemberantasan korupsi.

Abstract

This journal writing begins with a study of the rise of interest in the eradication of corruption by the Commission reports in the media. Social reality of it can form a social construction in the community, especially students. This research method used descriptive qualitative. In this case study describes students' social construction of combating corruption reports by the Commission based on the facts on the ground were collected through interviews and documentation in the study area. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation, drawing conclusions. This results show that students tend to be constructed by the campus activists fighting corruption reports by the Commission in the media. Students believe the news eradication of corruption by the Commission. Sentence meted out to suspected corruption is considered not ideal. In addition to referring to the media coverage, student activists and non-college campus also has ideals and assessment of corruption. In contrast to the social construction of non-activist students who only refers to the media coverage.

Keywords: social construction, reporting, eradication of corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya

dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri (Kartono, 2005:90). Oleh karena itu dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini, peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Pada kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi

terutama di birokrasi dan layanan publik, sedangkan dari sisi preventif, tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Masyarakat pada umumnya antikorupsi, namun pada realitanya seringkali melakukan tindakan yang koruptif atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi lahan korupsi.

Secara nasional, jumlah laporan praktek korupsi yang masuk ke meja KPK telah mencapai 57.964 kasus. Terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus 5.655 kasus dan terendah praktek korupsi pejabat negara yang bertugas di luar negeri sebanyak 123 kasus. Total jenis perkara korupsi yang ditangani KPK mencapai 335 kasus. Jumlah jenis perkara tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012 (Antara News, 26 September 2013). Selama 2004-2013 KPK berhasil menangani 385 kasus tindak pidana korupsi. Jumlah perkara yang telah ditangani di tahun 2013 sebanyak 48 kasus (Teras Pos, 26 September 2013).

Opini mengenai pemberantasan korupsi oleh KPK sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peran pers atau media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan opini publik pada suatu peristiwa tertentu bahkan terkadang membuat audiensnya tidak sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Menurut Shoemaker dan Reese (1996:223), setiap berita yang disajikan oleh media tentunya telah didesain sesuai dengan "kepentingan" media baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, maka teks media sangat dipengaruhi oleh pekerja media secara individu, rutinitas media, organisasi media itu sendiri, institusi di luar media, dan oleh ideologi.

Berita atau pesan yang ditampilkan oleh media seringkali dimaknai apa adanya oleh masyarakat. Artinya, masyarakat lebih terpengaruh pada judul berita yang dimunculkan dan kesan yang disimpulkan oleh media massa daripada menganalisis secara mendalam teks berita tersebut. Padahal dalam kenyataannya sering terjadi *misinformasi* dan *misinterpretasi* antara apa yang seharusnya disampaikan dan kenyataan yang diterima oleh pembaca (Fauzi, 2007:5-6).

Korupsi dan pemberitaan tentang pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa merupakan realitas sosial. Menurut Littlejohn (2001:175) bahwa realitas sosial sesungguhnya tidak lebih dari sekedar hasil konstruksi sosial dalam komunikasi tertentu. Teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoretis yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu

menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Substansi dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam komunitas primer dan semi sekunder. Dasar dari teori ini adalah dari pengamatan yang dilakukan pada tahun 1960-an pada masa transisi-era-modern di Amerika, dimana pada saat itu media massa belum begitu terkenal dan menjadi suatu industri yang besar dan berpengaruh. Kemudian seiring dengan perkembangan jaman dan media massa menjadi sangat substantif dalam proses eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi, teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman ini kemudian direvisi dan dikenal sebagai 'teori konstruksi sosial media massa'. Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui: tahap menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran konstruksi; tahap pembentukan konstruksi; tahap konfirmasi (Bungin, 2007:188-189).

Pada tahap menyiapkan materi konstruksi, ada tiga hal penting dalam tahapan ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum. Pada tahap sebaran konstruksi: prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca. Pembentukan konstruksi berlangsung melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua kesediaan dikonstruksi oleh media massa; (3) sebagai pilihan konsumtif. Pada tahap konfirmasi, yaitu tahapan ketika media massa maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi.

Pada kenyataannya, realitas sosial itu berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan suyektivitas individu lain dalam institusi sosialnya (Bungin, 2007:189).

Individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam

beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Sebagai lembaga publik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Selain pelaporan ke DPR dan audit BPK, KPK juga perlu mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai salah satu wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat.

Untuk itu, diperlukan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran konstruksi sosial pada mahasiswa tentang pemberitaan di media massa dalam hal pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang konstruksi sosial mahasiswa tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi sosial mahasiswa tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mendeskripsikan konstruksi sosial mahasiswa tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan menguraikannya secara kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya, karena lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Kota Surabaya merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur sehingga dapat menjadi representasi sebagai kota besar dan menjadi prioritas utama yang masuk dalam wilayah kegiatan pencegahan KPK karena memiliki aktivitas ekonomi, politik dan potensi pembangunan yang cukup tinggi. Selain itu, di Kota Surabaya terdapat banyak perguruan tinggi, dan salah satunya adalah Universitas Negeri Surabaya yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Kota Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Teknik pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih sampel atau informan penelitian dengan pertimbangan tertentu, yakni mengerti tentang

permasalahan dalam penelitian ini. subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya mahasiswa aktivis kampus, aktivis non kampus, dan nonaktivis.

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer menggunakan wawancara. Serta data sekunder yaitu sumber-sumber buku, skripsi terdahulu, jurnal, artikel, dokumen dokumen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya dan sumber-sumber dari internet.

HASIL PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Mahasiswa Aktivis Kampus Tentang Pemberitaan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Dalam tahap penyiapan materi konstruksi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis kampus mengaku sering mengikuti pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Adapun yang diberitakan media massa adalah tentang individu yang terlibat korupsi (tersangka dan saksi), kasus korupsinya, jumlah uang yang dikorupsi, kerugian negara akibat korupsi, proses penyelidikan sampai persidangan, hingga vonis yang dikenakan kepada tersangka korupsi. Mahasiswa aktivis kampus merasa senang dengan banyaknya penyelenggara negara yang menjadi tersangka oleh KPK. Hal ini dikarenakan para penyelenggara negara yang terlibat korupsi telah merugikan rakyat dan negara. Selain itu, hal ini menunjukkan bukti dari upaya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi oleh KPK. Mahasiswa aktivis kampus sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dikarenakan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah merugikan rakyat dan negara.

Pada langkah sebaran konstruksi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis kampus menganggap semua hal dalam pemberitaan tentang pemberantasan korupsi oleh KPK adalah penting. Hal ini dikarenakan sebelum mengambil sikap secara objektif maka harus ditelaah dulu semua hal yang ada dalam suatu pemberitaan korupsi, seperti siapa saja yang terlibat, kasus korupsi tentang apa, bagaimana proses hukumnya, dan sebagainya. Mahasiswa aktivis kampus menilai hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi selama ini belum setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dikarenakan hukuman dan kerugian akibat korupsi tidak seimbang sehingga hukumannya perlu lebih berat lagi agar dapat

menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara lainnya yang berniat untuk korupsi. Mahasiswa aktivis kampus menilai sepak terjang KPK dalam pemberantasan korupsi tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur politis. Hal ini dikarenakan adanya bukti bahwa KPK berani menangkap para koruptor dari berbagai partai baik partai yang berkuasa maupun oposisinya, bahkan orang dekat presiden.

Ketika pembentukan konstruksi realitas, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis kampus menilai pemberitaan yang disampaikan media massa tentang pemberantasan korupsi oleh KPK sesuai dengan realitas kebenaran. Hal ini dikarenakan sumber berita dari media massa mengacu pada informasi yang disampaikan oleh KPK. Mahasiswa aktivis kampus menilai hukuman yang cocok bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi adalah hukuman yang berat, setidaknya hukuman penjara lebih dari 20 tahun sampai dengan hukuman seumur hidup. Mahasiswa aktivis kampus yakin KPK mampu mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan KPK lembaga hukum yang lebih dipercaya oleh rakyat dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi.

Untuk tahap konfirmasi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis kampus mengaku percaya dengan pemberitaan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di media massa. Hal ini dikarenakan media massa bekerja untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, termasuk pemberitaan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Mahasiswa aktivis kampus mengaku belum puas dengan vonis hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Hal ini dikarenakan pembuktian tentang kasus-kasus korupsi tidak mudah, harus melewati proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sehingga memakan waktu, biaya, dan pikiran yang lebih besar bagi aparat penegak hukum. Mahasiswa aktivis kampus mengaku cukup puas dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan KPK dianggap sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menyeret para penyelenggara negara yang terlibat korupsi ke pengadilan.

Konstruksi Sosial Mahasiswa Aktivis Non-Kampus Tentang Pemberitaan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Penyiapan materi konstruksi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis non kampus mengaku sering mengikuti pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Adapun yang diberitakan media massa adalah tentang individu yang terlibat korupsi (tersangka dan saksi), kasus korupsinya, jumlah uang yang dikorupsi, proses hukum, dan pernyataan resmi dari KPK. Mahasiswa aktivis non kampus merasa senang dengan banyaknya penyelenggara negara yang menjadi tersangka oleh KPK. Hal ini dikarenakan para koruptor tersebut telah menyengsarakan rakyat banyak sehingga harus dididik oleh KPK. Mahasiswa aktivis non kampus sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dikarenakan korupsi harus diberantas tuntas dan lembaga yang menjadi andalan rakyat untuk melakukan itu adalah KPK.

Hal ini dikarenakan dengan mengetahui secara jelas siapa pelaku, kasus, jumlah yang dikorupsi, kerugian negara akibat korupsinya, serta sumber dari berita tersebut maka mahasiswa dapat mempercayai atau tidak pemberitaan tersebut. Mahasiswa aktivis non kampus menilai hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi selama ini belum setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dikarenakan korupsi adalah kejahatan yang berat sehingga hukumannya juga harus berat. Selama ini ini hukuman bagi pejabat yang korupsi dianggap relatif lebih ringan dibanding rakyat biasa yang terlibat kriminal. Mahasiswa aktivis non kampus menilai sepak terjang KPK dalam pemberantasan korupsi dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur politis. Hal ini dikarenakan KPK adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden sehingga bisa jadi kurang berani mengusut orang-orang dekat presiden yang diduga melakukan korupsi.

Pembentukan konstruksi realitas, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis non kampus menilai sebagian besar pemberitaan yang disampaikan media massa tentang pemberantasan korupsi oleh KPK sesuai dengan realitas kebenaran dan sebagian kecil kurang sesuai. Hal ini dikarenakan beberapa media massa cenderung melebih-lebihkan suatu pemberitaan agar medianya terangkat atau laris dikonsumsi oleh publik. Mahasiswa aktivis non kampus menilai hukuman yang cocok bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi adalah hukuman yang berat, maksimal hukuman mati dengan alasan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan rakyat dan negara. Mahasiswa aktivis non kampus cukup yakin KPK mampu mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan KPK hingga saat ini telah membuktikan diri untuk menangkap beberapa pejabat negara yang terlibat kasus korupsi.

Menginjak tahapan konfirmasi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa aktivis non kampus mengaku cukup percaya

dengan pemberitaan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di media massa. Hal ini dikarenakan media massa dinilai tidak sembarangan mengolah suatu informasi menjadi suatu berita yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mahasiswa aktivis non kampus mengaku kurang puas dengan vonis hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Hal ini dikarenakan hukuman bagi koruptor masih kurang berat sehingga dapat membuat koruptor yang lain tidak takut melakukan korupsi. Mahasiswa aktivis non kampus mengaku cukup puas dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan KPK dianggap sudah memberikan bukti kinerjanya kepada masyarakat dengan menangkap para penyelenggara negara yang terlibat korupsi.

Konstruksi Sosial Mahasiswa Non-Aktifis Tentang Pemberitaan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Pada penyiapan materi konstruksi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa nonaktifis mengaku sering mengikuti pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Adapun yang diberitakan media massa adalah tentang pelaku, kasusnya, kerugian akibat korupsi, dan proses hukumnya. Mahasiswa nonaktifis merasa senang dengan banyaknya penyelenggara negara yang menjadi tersangka oleh KPK. Hal ini dikarenakan para koruptor tersebut adalah penyakit sosial dalam masyarakat sehingga harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mahasiswa nonaktifis sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dikarenakan KPK memiliki tugas yang berat dan penuh rintangan sehingga harus didukung penuh oleh masyarakat.

Hal ini dikarenakan dengan mengetahui sumber berita, siapa pelaku, kasus, jumlah uang yang dikorupsi, dan proses hukumnya maka mahasiswa dapat memahami pemberitaan tersebut secara lebih jelas. Mahasiswa nonaktifis menilai hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi selama ini cukup setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan kepada para koruptor sudah melewati proses persidangan sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang ada. Mahasiswa nonaktifis menilai KPK tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur politis dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan KPK adalah lembaga terpercaya yang berisi orang-orang pilihan dengan integritas yang tinggi dan tanpa pandang bulu dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa nonaktifis menilai pemberitaan yang disampaikan media massa tentang pemberantasan korupsi oleh KPK sesuai dengan realitas kebenaran. Dalam hal ini media massa dapat dituntut secara hukum jika memberitakan korupsi yang tidak sesuai dengan fakta. Mahasiswa nonaktifis menilai

hukuman yang cocok bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi adalah sesuai dengan hasil pengadilan. Hal ini dikarenakan koruptor telah mendapat hukuman yang lebih berat yakni rasa malu yang harus ditanggung olehnya dan keluarganya, serta goncangan jiwa akibat perubahan dari hidup mewah menjadi hidup di penjara. Mahasiswa aktivis kampus yakin KPK mampu mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan KPK dilindungi oleh undang-undang dan pengusutan kasus korupsi membutuhkan waktu cukup lama.

Dalam tahap konfirmasi, maka konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus tentang pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan bahwa mahasiswa nonaktifis mengaku percaya dengan pemberitaan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di media massa. Hal ini dikarenakan media massa dinilai cukup berhati-hati sebelum memberitakan kasus tentang korupsi. Mahasiswa nonaktifis mengaku cukup puas dengan vonis hukuman yang diberikan kepada penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Hal ini dikarenakan berat tidaknya vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari berat tidaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka korupsi. Mahasiswa nonaktifis mengaku puas dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan KPK dianggap sudah menunjukkan keberanian untuk mengusut para pejabat negara sebagai upaya pemberantasan korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Mahasiswa aktivis kampus cenderung terkonstruksi oleh pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Selain itu, opini mahasiswa aktivis kampus cenderung sinis terhadap vonis hukuman bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Mahasiswa aktivis kampus adalah mahasiswa yang terlibat organisasi di dalam (intra) kampus. Organisasi intra kampus lebih menekankan pada pematangan mengenai keterampilan berorganisasi berdasarkan kajian keilmuan atau profesi. Namun mahasiswa aktivis kampus juga sering melakukan kajian-kajian tentang fenomena sosial yang terjadi dan berkembang luas di masyarakat, termasuk masalah korupsi. Mahasiswa aktivis kampus rata-rata melek media, karena dari situlah mereka mendapatkan bahan atau materi untuk dikaji secara keilmuan sesuai jurusan masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan mereka cenderung terkonstruksi oleh media massa. Di samping itu, dari berbagai kajian keilmuan dan kegiatan sosial yang dilakukan mahasiswa aktivis kampus maka berdampak pada terbentuknya idealisme yang tinggi yang mempengaruhi konstruksi berpikir mereka dalam memahami berbagai permasalahan sosial, termasuk masalah korupsi. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi sinis terhadap vonis hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka korupsi yang dianggap belum ideal bagi mereka. Dalam konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus, korupsi

merupakan kejahatan yang berat karena merugikan rakyat dan negara sehingga seyogianya pelaku korupsi dijatuhkan hukuman berat pula.

Mahasiswa aktivis non kampus juga cenderung terkonstruksi oleh pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa. Selain itu, opini mahasiswa aktivis non kampus juga cenderung sinis terhadap vonis hukuman bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Mahasiswa aktivis non kampus adalah mahasiswa yang terlibat organisasi di luar kampus. Organisasi di luar kampus ini kebanyakan adalah organisasi massa (ormas) sehingga dalam organisasi non kampus terdapat doktrinasi berupa ideologi yang harus dipelajari dan dipahami oleh anggotanya dari ormas tersebut. Mahasiswa aktivis non kampus juga sering melakukan kajian-kajian tentang fenomena sosial yang terjadi dan berkembang luas di masyarakat, termasuk masalah korupsi. Mahasiswa aktivis non kampus juga kebanyakan melek media, karena dari situlah mereka mendapatkan bahan atau materi untuk dikaji sebagai dasar dari suatu aksi atau kegiatan yang akan lakukan. Hal inilah yang dapat menyebabkan mereka cenderung terkonstruksi oleh media massa. Berbagai kajian sosial dan aksi atau kegiatan serta doktrinasi ideologis ormas yang dilakukan dan diterima oleh mahasiswa nonaktivis maka berdampak pada terbentuknya idealisme yang tinggi yang mempengaruhi konstruksi berpikir mereka dalam memahami berbagai permasalahan sosial, termasuk korupsi. Hal inilah yang dapat menyebabkan mereka menjadi sinis terhadap vonis hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka korupsi yang dianggap belum ideal bagi mereka. Dalam konstruksi sosial mahasiswa aktivis kampus, korupsi merupakan kejahatan yang berat karena merugikan rakyat dan negara sehingga seharusnya pelaku korupsi dijatuhkan hukuman berat pula.

Mahasiswa nonaktivis cenderung terkonstruksi oleh pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK di media massa dan vonis hukuman bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi. Mahasiswa nonaktivis tidak terlibat organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Mahasiswa tipikal ini biasanya lebih sibuk kuliah demi mengejar prestasi akademik. Mahasiswa nonaktivis pun juga banyak yang melek media, karena dari situlah mereka mencari informasi untuk mengerjakan tugas atau sekedar bergaul di media sosial. Dari hal tersebut yang dapat menyebabkan mereka cenderung terkonstruksi oleh media massa. Mahasiswa nonaktivis biasanya jarang mengikuti diskusi atau kajian-kajian sosial yang diselenggarakan oleh para mahasiswa aktivis kampus dan non kampus. Mahasiswa nonaktivis lebih sering ke perpustakaan atau melakukan hobinya sehingga idealism mereka tentang sesuatu hal tidak setinggi mahasiswa aktivis kampus dan non kampus. Mahasiswa nonaktivis lebih mengandalkan informasi dan pengetahuan dari pemberitaan media massa. Hal ini pun dapat menyebabkan mereka cenderung terkonstruksi pula oleh media massa, termasuk mengenai vonis hukuman yang dijatuhkan bagi penyelenggara negara yang terbukti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. 26 September 2013. "KPK Belum Tangani 321 Kasus Korupsi Sulbar". <http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/49827/kpk-belum-tangani-321-kasus-korupsi-sulbar>
- Bungin, Burhan. 2007. "Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat". Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Arifatul Choiri. 2007. "Kabar-kabar Kekerasan dari Bali". Yogyakarta: LKIS.
- Kartono, Kartini. 2005. "Patologi Sosial Jilid 1". Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Littlejohn, Stephen W. 2001. "Theories of Human Communication". USA: Wadsworth Publishing Company.
- Shoemaker, Pamela J. dan Reese, Stephen D. 1996. "Mediating The Message: Theories of Influence on Mass Media Content". New York: Longman Publishing Group.
- Teras Pos. 26 September 2013. "KPK Tuntaskan Penanganan 385 Kasus Korupsi". <http://hukum.teraspos.com/read/2013/09/26/61625/kpk-tuntaskan-penanganan-385-kasus-korupsi>